

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menjadi tiga zona, yaitu zona industri perikanan, zona dengan kuota tangkapan nelayan lokal, dan zona dengan pembatasan penangkapan ikan atau zona pemijahan/berkembang biak (Adriyani & Gumilang, 2023).

Pemerintah mengimplementasikan pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pendaratan Ikan dengan maksud mendukung kemajuan sektor perikanan, khususnya dalam memfasilitasi kegiatan usaha perikanan rakyat melalui fasilitas pelelangan ikan. Kegiatan ekonomi perikanan, yang terutama dilakukan oleh masyarakat perikanan umumnya dan nelayan khususnya, dilakukan dengan tujuan agar dapat berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah (Mahottama, 2017).

Pembangunan pelabuhan ini dilakukan di wilayah pesisir yang menjadi zona peralihan antara daratan dan laut. Daerah ini merupakan habitat alami bagi berbagai organisme laut yang memerlukan lingkungan yang baik untuk kelangsungan hidupnya (Erna, 2023).

Pelabuhan perikanan di Indonesia dikelompokkan ke dalam empat kategori, yakni pelabuhan perikanan samudera atau PPS (7 pelabuhan), pelabuhan perikanan nusantara atau PPN (17 pelabuhan), pelabuhan perikanan pantai atau PPP (44 pelabuhan), dan pelabuhan perikanan pendaratan ikan atau PPI (499 pelabuhan) (BPS, 2023). Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa termasuk ke dalam Kelas C, terletak di teluk Antang Desa Tarempa Timur dengan perpaduan kontur geografis seperti perbukitan, sungai, hutan mangrove, pantai berpasir, terumbu karang, dan lainnya.

Pencegahan pencemaran sampah dari kapal dan aktivitas di pelabuhan telah dijelaskan dalam beberapa peraturan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, dijelaskan bahwa perlu dilakukan pencegahan pencemaran oleh sampah (*garbage*) dari kapal. Pada paragraf 5 disebutkan bahwa kapal-kapal harus melakukan penanganan sampah dengan baik dan terdapat aturan tidak boleh membuang beberapa jenis sampah ke laut, seperti plastik, tali sintetis, alat tangkap, kantong sampah plastik, bahan pengemasan dan pelapis, kertas, kaca, logam, botol, keramik, dan sampah sejenis. Selain pencegahan sampah dari kapal, peraturan tersebut juga menjelaskan perlu dilakukan pencegahan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan pada Bab IV. Peraturan tersebut juga menjelaskan ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi pencegahan pencemaran lingkungan maritim pada Bab VII. Peraturan lain yang mengatur tentang pencegahan pencemaran dari kapal dan lingkungan pelabuhan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Maka kapal-kapal perikanan yang bersandar di PPP Tarempa dan Pelabuhan Perikanan Tarempa harus memperhatikan pencegahan pencemaran di pelabuhan perikanan.

Selama ini, manajemen sampah di Pelabuhan perikanan hanya berfokus pada sampah yang berasal dari pengguna Pelabuhan, tanpa mempertimbangkan sampah yang dihasilkan oleh kapal-kapal ikan. Penting bagi pengelola pelabuhan untuk

mengetahui jumlah, jenis, dan volume sampah yang berasal dari armada kapal ikan, agar penanganan dan manajemen sampah di Pelabuhan perikanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Rahman, 2021).

Aktifitas nelayan dan awak kapal perikanan di pelabuhan perikanan sedikit banyak menghasilkan pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah sampah. Penanggulangan dan penanganan sampah membutuhkan partisipasi nelayan, bukan hanya urusan pemerintah semata. Setiap tahun, jumlah sampah terus bertambah sejalan dengan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih cenderung konsumtif, serta pertumbuhan aktivitas yang semakin meningkat, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sahil et al., 2016).

Masalah pencemaran sampah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa menjadi fokus utama yang memerlukan solusi demi menciptakan pelabuhan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi strategi pencegahan terhadap penumpukan sampah yang berasal dari kegiatan nelayan di pelabuhan perikanan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa yang terletak di teluk antang merupakan kawasan yang dikelola secara penuh oleh instansi terkait. Status lahan yang tersebut milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun secara administrasi juga merupakan bagian dari Pemerintah Desa Tarempa Timur.

Peningkatan jumlah produksi dan banyaknya kapal yang keluar-masuk pelabuhan pelabuhan tersebut ikut andil terhadap peningkatan potensi timbulan sampah yang dihasilkan. Kehadiran aktivitas di pelabuhan perikanan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, baik dari aktivitas darat maupun laut. Aktivitas darat tersebut meliputi operasional perkantoran, produksi dan perbaikan kapal serta jaring, berbagai toko dan warung, serta kegiatan industri lainnya. Kegiatan pemuatan dan pembongkaran di laut, tumpahan bahan bakar dan minyak pelumas, limbah padat, serta air limbah dari aktivitas laut, merupakan contoh aktifitas yang dapat mencemari laut. (Risnandar, 2021)

Perilaku nelayan awak kapal perikanan yang sering membuang sampah langsung ke laut telah menimbulkan gangguan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan perairan pelabuhan perikanan. Sampah plastik dapat menyangkut di baling-baling kapal nelayan, termakan oleh biota laut, serta menimbulkan pemandangan yang kurang baik.

Dengan demikian pernyataan permasalahan dalam penelitian ini adalah sbb:

1. Bagaimana jenis, komposisi, dan timbulan sampah yang dihasilkan oleh nelayan yang beraktifitas di pelabuhan perikanan?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran ABK dalam pencegahan pencemaran sampah di lingkungan perairan pelabuhan perikanan?
3. Bagaimana rumusan strategi pencegahan timbulan sampah di lingkungan perairan pelabuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis jenis, komposisi, dan timbulan sampah yang bersumber dari kapal yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa;

2. Menganalisis tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta awak kapal perikanan dalam pengendalian sampah yang terdapat di perairan pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa;
3. Merumuskan strategi pencegahan timbulan sampah di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa untuk mendukung pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan melalui peningkatan peran serta dan kepedulian pengguna pelabuhan perikanan.
2. Tersedianya rumusan strategi bagi manajemen Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa untuk meningkatkan kualitas lingkungan pelabuhan.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pengelola kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa dan pihak terkait untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa agar kawasan pelabuhan lebih tertata dan berwawasan lingkungan.

1.5 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian